

BAB IV

UPAYA UNI EROPA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI, MILITER, SOSIAL DAN BUDAYA SEBAGAI KEKUATAN DUNIA

Pada bab ini menjelaskan mengenai upaya pembangunan Uni Eropa sebagai kekuatan dunia pasca perang dingin. Uni Eropa sebagai sebuah organisasi regional dikawasan Eropa yang telah mencakup berbagai bidang, juga memiliki beragam bentuk kebijakan. Dimana pada awal pembentukannya, hanya bidang pembangunan ekonomi dan politik sebagai base dimention. Lewat perkembangannya, Uni Eropa memperluas bidang cakupannya ke bidang-bidang lainnya seperti bidang pembangunan sosial, hukum, pertahanan keamanan, sosial budaya dan politik luar negeri.

A. Strategi ekonomi

Bentuk pembangunan di bidang ekonomi, dimana Uni eropa bertindak sebagai pelaku tunggal dalam perdagangan luar negeri dan mendukung prinsip-prinsip perdagangan internasional yang bebas dan adil. Berhubung Uni Eropa bernegosiasi dengan satu suara, Uni Eropa dapat memberikan pengaruh yang nyata. Secara bersama-sama, 27 negara anggota Uni Eropa menguasai 19% dari ekspor dan impor dunia. Karena norma-norma teknisnya dipergunakan secara luas di seluruh dunia, Uni Eropa seringkali menentukan aturan perdebatan.

Uni Eropa siap menghadapi tantangan untuk mengelola isu-isu ekonomi dan keuangan internasional, misalnya dalam konteks G-20. Uni Eropa memberi

kontribusi untuk upaya yang sedang berlangsung untuk mereformasi lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan IMF serta mengatur ulang sektor keuangan internasional. Mata uang bersama, yaitu euro, memberikan pengaruh tambahan atas wilayah euro dan Bank Sentral Eropa.

Gagasan awal untuk membentuk suatu organisasi regional di benua Eropa muncul pada akhir Perang Dunia II atau pada tahun 1945. Munculnya gagasan tersebut didasari oleh konflik antar negara-negara di Eropa pada Perang Dunia I dan II. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan dan diwujudkan melalui berdirinya European Coal and Steel Community (ECSC) pada tahun 1950.¹ Tujuan utama organisasi tersebut yaitu untuk membentuk kerja sama ekonomi antar negara-negara di Eropa (Briney, 2010). Dinamakan “*coal and steel*” karena *coal* (batu bara) dan *steel* (baja) adalah bahan baku dalam proses industri, di mana industri merupakan sumber perekonomian utama bagi sebagian besar negara di Eropa. Dengan adanya kerja sama ekonomi di antara negara-negara tersebut, maka diharapkan akan timbul suatu rasa saling membutuhkan satu sama lain, sehingga konflik bisa dihindari. Salah satu cara dalam kerja sama ekonomi tersebut, dengan dibebaskannya proses keluar masuknya baja dan batu bara dari satu negara ke negara lain, dengan kata lain batas-batas negara semakin dibuat transparan dalam hal ekonomi.

Kemudian pada tahun 1958, ECSC berganti nama menjadi European Economic Community. Pergantian nama tersebut mencerminkan bahwa kerja sama ekonomi yang berlangsung di Eropa tidak hanya sebatas batu bara dan baja

¹ Briney, Amanda. 2010. The European Union: A History and Overview, dalam [<http://geography.about.com/od/geographyintern/a/euoverview.htm>]

saja, tapi juga semua aspek ekonomi. Pada tahun 1980-an, Uni Eropa membentuk *Single Market*, yang baru benar-benar aktif pada tahun 1992, yang meliputi perdagangan barang dan jasa, serta perpindahan manusia dan uang. Salah satu akibat dari terbentuknya *single market* adalah munculnya satu mata uang (*currency*) yang disepakati untuk digunakan dalam wilayah Uni Eropa oleh sebagian besar negara-negara di Eropa, yaitu Euro. Hal tersebut mencerminkan sebuah usaha untuk membangun sebuah kawasan yang memiliki tingkat perekonomian tinggi secara merata dan bersama-sama.² Manfaat yang paling utama dari adanya mata uang tunggal Euro adalah menghilangkan fluktuasi nilai tukar dan biaya pertukaran antar mata uang. Sehingga perdagangan bisa berlangsung dengan lancar, tanpa ada hambatan perbedaan nilai tukar, dan orang-orang bisa bepergian dengan bebas di antara negara-negara Eropa, tanpa menghiraukan batas-batas negara.

Sebelum dapat bergabung menjadi anggota Uni Eropa, negara diharuskan memenuhi syarat tertentu, layaknya mengimplementasikan peraturan dan regulasi Uni Eropa diseluruh wilayahnya. Juga terdapat syarat yang disebut *Copenhagen Criteria*, yang mana termasuk dalam ekonomi pasar bebas, juga demokrasi yang stabil beserta aturannya, juga penerimaan seluruh pelegalan Uni Eropa termasuk Euro. Tahap pertama, negara harus mengirimkan aplikasi keanggotaan kepada Dewan, yang kemudian menyampaikan kepada Komisi untuk memastikan kemampuan negara tersebut dalam pemenuhan *Copenhagen criteria*. Bila terdapat

² Sulistyono. 2013. European Union, tt. Treaty establishing the European Coal and Steel Community, ECSC Treaty, dalam [http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_en.htm]

respon positif dari Komisi, maka akan diadakan negosiasi oleh pihak Dewan, untuk membicarakan lebih lanjut mengenai penerimaan tersebut.

Dalam keuangannya, Uni Eropa mendapatkan pemasukan dari persentase tertentu yang merupakan kontribusi dari setiap negara. Terdapat 3 hal yang menjadi sumber utama dalam pemasukan keuangan Uni Eropa. Yang pertama, adalah 0,73% dari GDP masing-masing negara, dimana prinsip dasarnya adalah solidaritas dan kemampuan untuk membayar, juga terdapat penyesuaian jikalau sebuah negara memiliki beban tertentu. Yang kedua, yakni dari biaya masuknya produk-produk dari luar Uni Eropa. Dan yang ketiga, adalah persentase penerimaan pajak pertambahan nilai masing-masing negara yang dikenal dengan PPN. Satu lagi yang menjadi tambahan, yaitu Uni Eropa juga menerima pemasukan dari pajak yang dibayarkan oleh staf Uni Eropa akan gaji mereka dan juga dari denda atas perusahaan yang melanggar peraturan juga kebijakan Uni Eropa.

Peranan Uni Eropa dalam Bidang ekonomi tidak perlu disangsikan lagi. Hal tersebut beranjak dari masuknya negara-negara Eropa yang merepresentasikan simbol-simbol keamanan ekonomi seperti Jerman, Perancis dan Inggris di dalamnya. Salah satu bentuk keseriusan Uni Eropa untuk membentuk wadah integrasi ekonomi yang independen dan mematahkan supremasi ekonomi negara adidaya seperti Amerika Serikat terutama di ranah Eropa sebelum melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi ke luar Eropa.

Pada awal tahun 1987, 12 negara anggota Uni Eropa membuat pasar tunggal untuk barang, jasa, dan modal, yang baru dapat diselesaikan tahun 1992

dengan menghasilkan 282 peraturan sehubungan dengan pasar tunggal Eropa. Sekarang, berdasarkan survei oleh Boddewyn and Grosse ditemukan adanya pertumbuhan standarisasi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan USA di Uni Eropa menyangkut perbedaan antara negara Uni Eropa baik di bidang selera, kebiasaan, peraturan pemerataan untuk barang konsumsi dan barang industri. Temuan ini mendorong Uni Eropa membuat harmonisasi dalam segala bidang. Terakhir yang dilakukan adalah pembentukan *Economic and Monetary Union* (EMU) termasuk pembentukan *European Central Bank* dan mata uang tunggal Eropa (EURO) di tahun 1999 dan berlaku per Januari 2002.

Uni Eropa menginginkan negara yang merdeka dalam suatu negara seperti negara Federasi dengan derajat yang berbeda. Penyatuan mata uang Eropa menjadi Euro pada masa itu diikuti oleh 12 negara kecuali Inggris (*United Kingdom*), Swedia dan Finlandia. Ke-12 negara yang menyatukan uangnya menjadi Euro disebut Euro Zone.

Adapun yang menjadi syarat negara-negara anggota bergabung dengan Zone Euro

- Tingkat inflasi tidak lebih dari 1,5% di atas tingkat inflasi dari anggota lain yang memiliki inflasi paling rendah
- Tingkat suku bunga jangka panjang dari obligasi pemerintah tidak lebih dari 2%.
- Masing-masing negara harus menjaga nilai tukar mata uangnya tidak melebihi margin (*band*) yang ditetapkan sistem moneter Eropa.
- Defisit anggaran pemerintah tidak melebihi 3% dari GDP.

- Posisi hutang luar negeri pemerintah tidak melebihi 60% dari GD.

Sedangkan yang menjadi kebijakan perdagangan Uni Eropa meliputi :

a. Internal Market

- Pelarangan *creosote-treated wood*
- Ecolabel
- Larangan pada Penggunaan Produk yang tidak Berwawasan Lingkungan
- Food Label & Food Safety
- White paper On chemicals

b. Perdagangan Internasional

- Tarif
- GSP
- Dumping dan subsidi
- Tekstil
- Small and Medium Enterprises di UE (UKM).
- Peran Aktif Perdagangan Uni Eropa

Uni Eropa kini dianggap sebagai salah satu mitra dagang yang terkemuka dan paling terbuka di antara semua mitra dagang di dunia. Uni Eropa juga merupakan pasar tunggal terbesar di dunia. Secara bersama-sama, ke-27 Negara Anggota Uni Eropa mewakili hanya 7% dari jumlah penduduk dunia, namun mereka mewakili hampir 20% dari impor dan ekspor dunia. Seperangkat peraturan perdagangan, cukai, dan prosedur administrasi berlaku bagi seluruh kawasan Uni Eropa, yang mempermudah akses para eksportir negara-negara yang sedang

berkembang ke Uni Eropa. Ke-27 Negara Anggota Uni Eropa juga merundingkan perjanjian-perjanjian perdagangan sebagai sebuah blok, melalui Komisi Eropa.

Mata uang tunggal Eropa, euro (€), akan membantu pasar tunggal mencapai potensinya secara penuh. Enambelas dari 27 Negara Anggota Uni Eropa saat ini telah menggunakan euro, sehingga menghilangkan ketidakpastian yang terkait dengan ketidakstabilan nilai tukar. Efek penciptaan perdagangan (*trade creation*) dihasilkan oleh dampak positif terhadap pertumbuhan Euro yang ekonomis, yang juga menguntungkan Indonesia sebagai suatu peluang untuk memperluas pinjaman luar negerinya.

Tujuan strategis Uni Eropa adalah untuk membuka pasarnya sendiri yang juga dilakukan oleh negara-negara lain. Uni Eropa berupaya untuk secara bertahap menghilangkan hambatan-hambatan terhadap perdagangan, pada laju yang dapat diterima baik oleh Uni Eropa maupun Negara-negara lain, menyelesaikan perselisihan secara damai, dan membentuk sebuah badan dengan peraturan yang disepakati secara internasional untuk melindungi dari diskriminasi, sekaligus meningkatkan transparansi dan pengawasan masyarakat.

Membuka perdagangan merangsang perekonomian secara keseluruhan, dengan meningkatnya pendapatan negara-negara eksportir, sekaligus memberikan kepada konsumen pilihan barang atau jasa yang lebih beragam dengan harga yang lebih murah. Uni Eropa melihat keterbukaan progresif terhadap perdagangan sebagai satu bagian dari strategi pembangunan yang telah mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan di negara-negara sedang berkembang, dan dapat melakukan hal yang sama untuk ratusan juta orang lainnya. Apabila disertai

dengan kebijakan-kebijakan pendukung yang tepat dan digunakan dengan benar, maka kebijakan-kebijakan perdagangan dapat memberikan peluang bagi peningkatan pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan merupakan suatu prinsip mendasar bagi strategi perdagangan Uni Eropa, yang bertujuan untuk mendukung integrasi negara-negara sedang berkembang secara bertahap ke dalam ekonomi dunia dan sistem perdagangan multilateral.

Salah satu alat Uni Eropa yang paling efisien dalam mendukung negara-negara sedang berkembang untuk melakukan integrasi secara bertahap tersebut adalah apa yang disebut dengan *Generalised System of Preferences* (GSP) (preferensi berupa fasilitas keringanan bea masuk untuk negara-negara yang sedang berkembang), yang memberikan akses istimewa untuk barang-barang yang diproduksi di negara-negara sedang berkembang. Akses istimewa ini berkontribusi dalam membuat Uni Eropa menjadi pasar ekspor terbesar untuk negara-negara sedang berkembang.

Melalui sistem GSP, ekspor Indonesia juga dapat memasuki Uni Eropa dengan bea masuk yang lebih rendah atau nol atas berbagai produk. Pada tahun 2007, Indonesia merupakan salah satu penerima manfaat terbesar dari sistem GSP di dunia dengan jumlah ekspor yang mendapatkan perlakuan istimewa ke Uni Eropa mencapai total € 3 miliar.

Cara terbaik untuk memajukan liberalisasi perdagangan yang bermanfaat bagi semua adalah melalui wadah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang beranggotakan 153 negara. Melalui peran pentingnya dalam perundingan perdagangan internasional, Uni Eropa adalah pendukung gigih WTO yang

memainkan peran kunci dalam perundingan-perundingan perdagangan internasional dalam usaha menuju perdagangan yang adil dan globalisasi yang terkontrol dalam putaran perundingan perdagangan multilateral yang disebut dengan Agenda Pembangunan Doha (*Doha Development Agenda/DDA*).

Agenda Pembangunan Doha terdiri atas pembukaan pasar lebih lanjut dan pembuatan peraturan tambahan, yang didasari oleh komitmen untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengintegrasikan negara-negara sedang berkembang ke dalam sistem perdagangan dunia, khususnya dengan memperkuat bantuan untuk membangun kapasitas. Tujuan utama Putaran Doha adalah untuk menempatkan pembangunan di tengah-tengah sistem perdagangan dunia dalam satu cara yang akan membantu mereka dalam memerangi kemiskinan. Kerjasama antara Uni Eropa dan Rusia menggunakan dua pendekatan berbeda jadi melalui interaksi Uni Eropa secara keseluruhan dan interaksi Rusia dengan anggota negara-negara Uni Eropa secara bilateral.

Uni Eropa sebagai sebuah bentuk kawasan ekonomi yang dianggap paling mapan sebenarnya masih sangat membutuhkan Rusia untuk bergabung, mengingat sumber-sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi Rusia yang sangat besar, namun salah satu kesulitan Uni Eropa adalah belum seimbangannya kemampuan integrasi ekonomi dengan kemampuan keamanan di Eropa. Jika dalam satu sisi Eropa mencoba mandiri secara ekonomi yaitu dengan cara membuat mata uang tunggal (Euro) dan pasar bersama (*common market*) yang salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi pengaruh Amerika dalam kawasan Eropa. Di sisi lain dalam masalah-masalah keamanan mereka justru masih sangat tergantung

dengan Amerika Serikat. Selama Amerika masih bisa bermain dominan dalam kawasan Eropa maka akan sangat sulit Uni Eropa untuk mengajak Rusia bergabung kedalamnya

Anggota Uni Eropa sudah hampir menarik seluruh eks negara Eropa Tengah dan Timur yang pada masa Perang Dingin negara tersebut adalah sekutu Uni Soviet. Dengan semakin kuatnya Uni Eropa telah menjadi daya tarik bagi negara sekitarnya untuk menjadi anggota. Uni Eropa harus menjalani seleksi yang ketat, setiap calon harus melaksanakan kebebasan, keamanan, keadilan dan setelah menjadi negara anggota Uni Eropa masih diberlakukan suatu ketentuan tentang pelaksanaan hak asasi manusia, transparansi dan pemerintahan yang baik. Selain dengan Rusia, Uni Eropa juga melakukan hubungan kemitraan dengan Indonesia. Hingga saat ini Uni Eropa merupakan mitra dagang nomor satu Indonesia. Selain tujuan utama ekspor Indonesia, nilai ekspor Indonesia juga telah mencapai satu milyar Euro. Selain mengekspor ke Uni Eropa sebagai timbal balik Uni Eropa juga sebagai negara donor terbesar bagi Indonesia dalam upaya pengembangan/mengembangkan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

Tabel 4.1 Data Kuantitatif Dinamika Perekonomian Negara

Kawasan	Pertumbuhan riil (% per tahun)				GDP harga dasar 1990 (milliar US \$)				
	1991	1991	1994	2001	1993	2000	2010	2015	2025
	-	-	-	-					
	2000	1993	2000	2010					
Amerika Utara	2,7	1,6	3,1	2,6	6.889	8.542	11.069	12.601	16.600
USA	2,5	1,7	2,8	2,0	5.808	7.069	8.617	9.513	11.597
Eropa	2,3	0,3	3,2	3,1	6.418	7.997	10.859	12.506	7.462
Uni Eropa	2,3	0,5	3,1	2,2	4.496	5.807	7.912	7.777	9.026
Asia Timur	5,6	5,8	5,5	5,6	5.902	8.596	14.860	19.207	32.924
Asia Timur (kecuali Jepang)	7,5	8,6	7,0	6,8	3.693	5.916	11.463	15.457	28.352
Cina	8,5	11,5	7,2	7,5	1.743	2.843	5.861	8.220	16.169
ASEAN	6,6	6,2	6,8	6,8	1.121	1.781	3.434	4.592	8.228
Dunia	3,6	2,6	4,0	4,0	22.249	29.342	43.566	52.914	80.596

Sumber : Tommy TB. Koh. *The United States and East Asia ; Conlict and Co-operation hal 3 dalam Tilaar, 1997 hal 59.*

Untuk melihat sampai sejauh mana peranan perdagangan Internasional dalam menunjang aktivitas ekonomi negara dapat dilihat dari proporsi perdagangan internasional (ekspor + impor) terhadap GDP (*Gross Domestik Bruto*). GDP

adalah ukuran atas nilai pasar *output* berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi baik tanah , tenaga kerja, dan modal yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu.

Tinggi rendahnya angka prosentase perdagangan internasional terhadap GDP suatu negara juga menunjukkan tinggi rendahnya tingkat saling ketergantungan negara tersebut dengan negara lain dalam bidang ekonomi.

Dalam grafik 1 di atas menunjukkan bahwa negara-negara yang tergabung ke dalam Euro zone memiliki prosentase 73,3% dari GDP dibanding Amerika Serikat 23,97% dari GDP. Hal ini berarti peranan perdagangan Internasional lebih penting dalam membangun ekonomi negara-negara Uni Eropa dibanding Amerika Serikat sehingga aktivitas ekonomi negara-negara Uni Eropa tergantung dari aktivitas ekonomi negara-negara lain dibanding Amerika Serikat dan Jepang.

Tabel 4.2 Data Bank Dunia 2001

The big five GDP in the world 2001			
Peringkat	Negara	GDP (Juta Dollar)	Proporsi
1	Amerika Serikat	10.171.400	32,5 %
2	Uni Eropa	7.883.467	25,20 %
3	Jepang	4.245.191	13,57 %
4	Cina	1.159.017	3,70 %
5	Kanada	677.178	2,16 %
	Dunia	31.283.839	100 %

Sumber : *World Bank tahun dalam Tilaar, 1997 hal 62.*

Data Bank Dunia di tahun 2001 menunjukkan GDP Uni Eropa menduduki peringkat ke 2 dengan 25,2% dari GDP dunia seperti yang tercantum dalam tabel II. Amerika Serikat tetap menduduki peringkat pertama dengan 32,51% dari GDP dunia, disusul Jepang, China dan Canada. Peringkat kedua dari GDP dunia akan membawa pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian dunia, artinya perekonomian dunia secara otomatis akan diwarnai oleh aktivitas ekonomi negara-negara Uni Eropa.

Besar kecilnya GDP yang diperoleh suatu negara menunjukkan intensitas aktivitas ekonomi mereka, Makin tinggi tinggi intensitas aktivitas ekonomi negara tertentu akan ditunjukkan dengan semakin tingginya GDP negara tersebut.

Sehingga, secara otomatis akan memberi peluang bagi negara lain untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan negara-negara ber GDP besar.

B. Strategi Security dalam militer dan keamanan

Bentuk pembangunan di Bidang Militer dimana, Uni Eropa memberi dukungan stabilitas di negara-negara Balkan. Proyek-proyek bantuan di tujuh negara mendapatkan bantuan dana dari Uni Eropa untuk membantu pembangunan masyarakat yang stabil. Di Kosovo , Uni Eropa menurunkan pasukan peradilan dan polisi berkekuatan 1900 personil untuk membantu menegakkan aturan hukum. Negara-negara di bagian barat Balkan telah menjadi kandidat atau calon kandidat anggota Uni Eropa sebagai bagian dari kebijakan perluasannya.

Kemudian, Uni Eropa dalah anggota dari Kuartet, bersama dengan PBB, Amerika Serikat dan Rusia, yang berupaya untuk mendorong terciptanya perdamaian ditimur tengah. Penyelesaian Konflik Arab-Israel merupakan prioritas strategis bagi Eropa. Tujuan Uni Eropa adalah solusi dua-negara dimana Negara Palestina yang merdeka, demokratis dan berkesinambungan hidup berdampingan dengan Israel dan Negara-negara tetangga lainnya.

Uni eropa menjalin Kerjasama erat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam berbagai masalah. Keyakinan Uni eropa tentang multilateralisme mencerminkan keterikatan dengan peraturan mengikat berdasarkan perundingan dalam hubungan internasional, dan secara tegas dituangkan dalam Traktat Lisabon, Apabila memungkinkan, Uni Eropa berupaya untuk menggantikan atau menurunkan kadar politik kekuasaan dengan aturan-aturan dan norma-norma,

sehingga membuat hubungan internasional lebih serupa dengan tatanan domestik: lebih damai dan terkirakan. Nampaknya, antara politik dan keamanan pertahanan memiliki korelasi yang cukup erat. Kemapanan pertahanan dan keamanan sebuah negara ataupun organisasi internasional seperti Uni Eropa berdampak terhadap pengaruh dan kekuatan dari kebijakan politik luar negeri yang diterapkan. Dalam konteks ini, negara-negara yang Eropa yang tergabung ke dalam NATO yang di satu sisi merasa terpinggirkan peranannya di dalam menentukan arah dan kebijakan strategi perang terutama yang menyangkut keamanan dan ketertiban daerah Balkan dan di sisi lain sudah tidak cocok lagi dengan dominasi Amerika Serikat melakukan satu bentuk resistensi dengan membentuk Pakta Pertahanan dan Keamanan di kawasan Uni Eropa.

Seorang Tony Blair, Perdana Menteri Inggris dan Chirac, Presiden Perancis yang memulai pertemuan dengan agenda membahas rencana pembentukan Pakta Pertahanan dan Keamanan di Kawasan Eropa yang independen bertempat di St. Malo di tahun 1998. Pertemuan ini dianggap sebagai tonggak awal berdirinya *Common European Security and Defence Policy* (CESDP) yang kemudian berdirilah *European Security and Defence Policy* (ESDP) di tahun 1999.

ESDP merupakan satu langkah maju dan upaya jitu dari Uni Eropa untuk memutus mata rantai supremasi pertahanan dan keamanan Amerika Serikat yang disimbolkan dengan NATO terutama dalam kaitan dengan pertahanan dan keamanan di daratan Eropa. Namun fakta justru berkata lain. Nampaknya ESDP

belum bisa melepaskan diri dari pengaruh NATO. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambatnya yaitu :

- Uni Eropa tidak memiliki banyak tenaga militer (*inadequate military forces*). Meskipun disebutkan bahwa Uni Eropa memiliki sekitar dua juta warga negara laki-laki dan dua juta warga negara wanita yang bisa dikerahkan untuk berperang (angka ini dikatakan lebih besar dari jumlah potensial angkatan AS untuk terjun ke medan perang). Namun, hal ini juga terkait mengenai permasalahan yang kedua, bahwa Uni Eropa memiliki *budget* yang terbatas untuk menyuplai anggaran pertahanan dan keamanannya. AS mungkin menganggarkan dana untuk urusan Pertahanan dan Keamanan lebih dari 3.5% dari GDP-nya. Atau bahkan, di masa Perang Irak, AS di bawah pemerintahan George W. Bush menganggarkan dana APBNnya untuk urusan pertahanan dan keamanan hampir mencapai 50% dari total pemasukan negara. Angka ini berbeda jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang sebagian besar menganggarkan dana pertahanan dan keamanannya kurang dari 2% dari GDP mereka (termasuk Inggris dan Prancis). Keadaan ini juga dianalogikan dalam pengisian bahan bakar pesawat tempur di mana Uni Eropa (dalam hal ini Inggris dan Prancis) secara bersama-sama hanya bisa mengisi sekitar 24 tangki bahan bakar. Sedangkan Amerika Serikat mampu mengisi sekitar 150 tangki bahan bakar pesawat tempur mereka. Angka ini hampir mencapai perbandingan 1:6. Secara matematis, kekuatan Uni Eropa hanya sekitar 1/6 dari kemampuan NATO untuk bisa melancarkan kegiatan pertahanan dan keamanannya. Ditambah lagi perlengkapan militer serta peralatan perang Uni Eropa yang masih dibilang kurang memadai untuk pertahanan dan keamanan bagi

Uni Eropa. Di lain pihak, Uni Eropa juga masih ketinggalan jauh di bidang intelijen dalam hal penginderaan satelit. Amerika Serikat dengan NASA-nya dilengkapi dengan perlengkapan astronomikal yang canggih beserta satelit-satelit yang mereka miliki mampu mendeteksi ancaman musuh ataupun serangan.

- Terjadi konflik intern ; Kadang kala, ESDP juga tidak berada dalam satu kebulatan suara. Misalnya pada masa Perang Irak. Uni Eropa terpecah antara kubu yang didukung oleh Inggris, Italia, Spanyol (negara-negara tersebut dikenal sebagai *New Europe*) serta beberapa negara Uni Eropa di sekitar wilayah Eropa Timur *vis-à-vis* dengan Prancis dan Jerman serta didukung oleh sebagian kecil negara Uni Eropa. Inggris mendukung agresi AS di Irak, sedangkan Jerman dan Prancis menolak hal tersebut. Dalam banyak kasus, ESDP selalu mendukung operasi yang dilakukan oleh NATO. Oleh karenanya, ESDP belum nampak seperti aktor keamanan global yang independen dan menentukan arah kebijakan luar negerinya sendiri tanpa harus mengekor pada setiap kebijakan dan operasi yang dilancarkan oleh NATO. Konflik intern perebutan pengaruh di dalam tubuh ESDP merupakan masalah kredit yang menerpa negara-negara Eropa dan hanya bisa dilacak akar konfliknya dari aspek historis. Konflik Inggris dan Perancis tentu saja tidak bisa lepas dari kemelut Perang Seratus Tahun, Perang Tujuh Tahun dan Politik Kontinental Napoleon Bonaparte yang kembali membuka luka lama antara Inggris dan Perancis (Astrid, 2011 : 165). Sedangkan konflik Jerman dan Perancis memiliki cerita yang sama di mana keduanya saling menginvasi wilayah masing. Begitu pula konflik Jerman dan Inggris yang dimulai pada Perang Dunia I dan berlanjut di masa Perang Dunia II di mana Jerman mengalami

kegagalan ketika ingin menginvasi Inggris. Sejauh ini Inggris masih dianggap sebagai pemegang kendali ESDP. Meskipun pada awalnya pembicaraan mengenai pembentukan sistem pertahanan dan keamanan Uni Eropa dilakukan oleh Prancis dan Inggris, namun yang paling banyak mengambil alih kemudi dari ESDP adalah Inggris. Sementara Jerman, yang dulunya merupakan sebuah kekuatan besar yang disegani pada tahun 1945-an nampaknya saat ini lebih memilih untuk bersikap pasif.

- Uni Eropa tidak memiliki tradisi *power politics* ataupun *energetic political action*. Hal ini mungkin dapat dilihat dari sejarah awal mula integrasi Uni Eropa di mana negara-negara di Eropa berkeinginan untuk menciptakan Eropa yang damai. Akibat perang-perang yang sering berkepanjangan di benua tersebut menyebabkan negara-negara di benua Eropa berupaya untuk meleburkan diri di dalam sebuah integrasi dan berupaya untuk mengeliminasi konflik ataupun perang yang berpotensi pecah di kemudian hari. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan neofungsionalis yang menggunakan instrumen ekonomi dan pasar sebagai langkah awal pembentukannya. Sedangkan upaya-upaya perbincangan yang mengarah kepada sistem pertahanan dan keamanan tidak pernah mencapai keberhasilan. Urusan militer serta pertahanan dan keamanan dianggap merupakan hal yang tabu dalam kesatuan integrasi Uni Eropa. ECSC sendiri pada mulanya merupakan forum yang ditujukan untuk melucuti potensi militer negara-negara Eropa, yang pada waktu itu merupakan upaya Prancis untuk mencegah Jerman kembali berkuasa sebagai kekuatan militer di Eropa terkait dengan tambang batu bara potensial di Ruhr, Jerman yang menjadi

perebutan negara-negara Eropa. Sebenarnya sudah banyak forum yang ditujukan untuk membahas masalah masalah pertahanan dan keamanan Eropa. Pada tahun 1950, Rene Pleven, Perdana Menteri Prancis mengusulkan dibentuknya *European Defence Community*. Namun ditolak oleh negara ECSC lainnya. Kemudian pada bulan Agustus 1954, negara-negara ECSC kembali mengajukan sistem pertahanan dan keamanan yang disebut Perjanjian *Western European Union (WEU)* namun justru Prancis yang kemudian menolak hal tersebut. Demikian seterusnya, hingga akhirnya permasalahan mengenai sistem militer ataupun pertahanan dan keamanan bagi Uni Eropa dianggap sebagai hal yang tabu. Barulah kemudian di tahun 1998 melalui pertemuan St. Malo di Prancis, Inggris di bawah Tony Blair dan Prancis dengan Presiden Chirac mulai membicarakan kembali mengenai upaya sistem pertahanan dan keamanan Uni Eropa melalui pembentukan ESDP.

Berkiblat pada apa yang menjadi kelemahan dari ESDP, dalam proyek kerjasamanya dengan NATO terdapat slogan penting yakni “no 3-D”, *no decoupling, no duplication, no discrimination*. Sehingga dalam mengamati hubungan antara NATO dengan ESDP muncul sebuah permasalahan baru bahwa ESDP dan NATO merupakan satu kesatuan angkatan bersenjata, atukah terdapat pembagian kerja (*division of labour*) dalam hubungan ESDP dengan NATO dalam sistem operasi militer. Mengingat kebanyakan upaya perdamaian yang dilakukan ESDP mengurus permasalahan yang bersifat *civillian (conflict prevention and crisis management, humanitarian and evacuation missions*, dan lain sebagainya).

Kekurangan ESDP dalam hal kapabilitas di segala aspek bidang pertahanan dan keamanan membuat kredibilitasnya juga turut dipertanyakan. Apalagi dalam isu untuk menjadi aktor keamanan global.

Sejauh ini, ESDP atau Uni Eropa nampaknya belum mampu menentukan posisi berdirinya (*stand position*) sendiri. ESDP belum mampu berdiri secara independen untuk menentukan arah kebijakan luar negeri serta pertahanan dan keamanan Uni Eropa. Seperti status ESDP sendiri yang termasuk dalam komponen *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) Uni Eropa. Selama ini ESDP masih merupakan modal (aset) bagi Amerika Serikat untuk melancarkan kepentingannya.

Dalam studi hubungan internasional adalah sangat urgen bagi sebuah entitas politik, khususnya negara untuk memiliki sistem pertahanan dan keamanan. Di samping itu kualitas angkatan bersenjata yang dimiliki juga menjadi kuat atau tidaknya sistem pertahanan dan keamanan suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari keahlian dan keterampilan angkatan bersenjata yang dimiliki, anggaran pertahanan dan keamanan yang dialokasikan, sistem dan teknologi yang digunakan, bahkan masalah strategi dan intelijen. Kualitas dan kapabilitas suatu sistem pertahanan dan keamanan tersebut juga bisa menyangkut permasalahan politik. Kesatuan pertahanan dan keamanan ESDP kadang kala dianggap *toothless* (ompong).

kemampuan pertahanan dan keamanan sebuah kawasan ikut menentukan pula sejauh mana pengaruh dari arah kebijakan politik yang dilakukan. Jika cara-cara politik dengan diplomasi tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan

bagi perubahan, maka komponen perang di mana militer sebagai instrumennya bisa dijadikan kekuatan represif terhadap musuh atau lawan politik.

Hal tersebut nampaknya juga berlaku dari berbagai isu politik yang coba diulas oleh Uni Eropa dalam kancah Internasional. Dari kacamata politik, Uni Eropa sebenarnya telah berperan besar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional yang memiliki dimensi politik. Seperti pada konflik Palestina dengan Israel. Dalam konteks ini Uni Eropa ikut mengecam dan mengutuk agresi militer yang dilakukan oleh Israel di Jalur Gaza, apalagi ketika terjadi penyerangan oleh tentara Israel terhadap kapal-kapal bantuan kemanusiaan Uni Eropa untuk penduduk Palestina (<http://www.Konspirasi.com/2010/06/15/uni-eropa-kutuk-israel>) ; konflik Libya : negara-negara Eropa menyuarakan kebulatan untuk mengecam agresifitas khadafi terhadap warganya dan telah melakukan pelanggaran HMA berat sehingga memintanya untuk segera lengser, Konflik Mesir : Para pemimpin 27 negara Uni Eropa menuntut agar transisi menuju demokrasi di Mesir dimulai aman dan tertib. Mereka juga mengecam kekerasan yang terjadi di Mesir (<http://www.Kompas.com/2011/02/05/pemimpin-uni-eropa-harap-transisi-mesir>).

Namun sudah dikatakan sebelumnya, bahwa penyelesaian isu-isu yang berdimensi politik dan berskala luas tersebut hanya bersifat wacana. Uni Eropa tidak mempunyai power berupa kemampuan pertahanan dan masih mengekor pada Amerika Serikat dengan instrument NATO.

C. Strategi Sosial-Budaya

Dalam bidang pembangunan sosial budaya, uni eropa berperan dalam isu HAM, Kesejahteraan, Demokrasi dan Pendidikan. Seperti Isu Ham, Uni Eropa turut serta dalam perundingan Protokol Kyoto tentang Perubahan Iklim dan, dengan meluncurkan suatu agenda domestik untuk karbon rendah yang mungkin merupakan yang paling canggih dan paling maju di dunia, terus menjadi pelaku penting terkait isu ini, sehingga berperan besar dalam mendorong suatu agenda yang ambisius untuk perubahan. Uni Eropa memusatkan perhatiannya pada upaya untuk membangun suatu koalisi untuk suatu kesepakatan yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim.

Kemudian, Uni Eropa berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan berupaya untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati di seluruh dunia. Uni Eropa telah menjadikan hak asasi manusia sebagai suatu aspek sentral dari hubungan luar negerinya: dalam dialog-dialog politik yang dilakukannya dengan negara-negara non-Uni Eropa; melalui kebijakan pembangunan dan bantuannya; atau melalui tindakannya dalam forum-forum multilateral, seperti PBB.

Didalam Isu Kesejahteraan, Uni Eropa juga mendukung pembangunan sosial dan ekonomi negara-negara mitranya, dan siap untuk membantu apabila negara-negara tersebut mengalami bencana. Secara bersama-sama, Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya merupakan donor terbesar di dunia untuk pembangunan dan bantuan kemanusiaan. Kontribusinya mencapai 60% dari bantuan pembangunan resmi di dunia.

Didalam Isu Pendidikan, Uni Eropa juga memiliki berbagai keunggulan. Dalam dunia pendidikan misalnya, sistem pendidikan yang terintegrasi di Uni Eropa telah berhasil diterapkan. Mahasiswa di Uni Eropa diwajibkan kuliah selama satu semester di negara selain negaranya sendiri. Dari integrasi pendidikan tersebut mahasiswa dari tiap negara bisa pindah ke negara lainnya, sehingga transfer knowledge dan budaya terhadap pemuda di Eropa dapat terjadi dengan cepat. Dengan kondisi yang demikian, kekayaan budaya dan pengetahuan sekiranya dapat berkembang dengan cepat. Integrasi yang demikian dianggap memiliki nilai yang sangat membangun.

Selain itu, di bidang sosial, salah satunya ada *The European Employment Forum*, di mana dalam kegiatan ini Uni Eropa mempromosikan perlindungan sosial dan inklusi dengan mengkoordinasi, mempromosikan dan menyediakan dana untuk mendukung upaya negara-negara anggota untuk memerangi pengucilan sosial dan kemiskinan dan reformasi sistem perlindungan sosial bagi para pekerja. Tujuannya antara lain untuk membuat pasar tenaga kerja berfungsi lebih baik, memperlengkapi orang-orang dengan keterampilan yang tepat untuk pekerjaan, meningkatkan kualitas kerja dan kondisi kerja, dan menciptakan lapangan kerja. Kemudian dalam bidang budaya, Uni Eropa membentuk EU Culture Program, yang tujuan utamanya tentu saja untuk melestarikan budaya-budaya khas Eropa dengan Memberikan Program Beasiswa kepada Negara-negara Luar yang ingin melanjutkan studinya ke Eropa dengan memberikan beasiswa (Erasmus Mundus) Program Erasmus Mundus adalah sebuah program kerjasama

dan mobilitas dalam bidang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempromosikan Uni Eropa sebagai pusat keunggulan ilmu di dunia.

Erasmus Mundus program baru dengan dana dari Uni Eropa sebesar € 16 milyar untuk membiayai program pendidikan, pelatihan, pemuda dan olah raga. Program ini dibentuk berdasarkan atas keberhasilan program Uni Eropa di bidang program pertukaran pelajar Erasmus.

Dalam bidang ilmu pengetahuan, Uni Eropa sangat gencar melakukan kegiatannya. Terbukti dengan diberikannya 3% dari anggaran GDP masing-masing negara, yang terbilang cukup besar, untuk penelitian ilmu pengetahuan. Program-program kegiatannya antara lain *Joint Research Center* (jaringan tujuh lembaga penelitian di Uni Eropa), *European Institute of Innovation and Technology* (menerjemahkan hasil penelitian ke dalam aplikasi komersial dengan menciptakan pengetahuan dan inovasi dalam masyarakat), serta *Food Security Center* (penelitian pengembangan pangan).